

**LAPORAN KEUANGAN  
UAPA/KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian yang dipimpinnya.

<Kementerian Pertahanan> adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan <Kementerian Pertahanan> mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Pertahanan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan

.....

	Hal
Kata Pengantar	.....
Daftar Isi	.....
Pernyataan Telah Direviu	.....
Pernyataan Tanggung Jawab	.....
Ringkasan	.....
I. Laporan Realisasi Anggaran	.....
II. Neraca	.....
III. Laporan Operasional	.....
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	.....
V. Catatan atas Laporan Keuangan	.....
A. Penjelasan Umum	.....
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	.....
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	.....
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	.....
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan	.....
F. Pengungkapan Penting Lainnya	.....
VI. Lampiran dan Daftar	.....

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN TAHUN 2xx1

Kami telah mereviu Laporan Keuangan <Kementerian Pertahanan> untuk tahun anggaran 2xx1 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2xx1 Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen <Kementerian Pertahanan>.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Nama Penandatanganan  
.....

**<KEMENTERIAN PERTAHANAN>**

---

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan <Kementerian Pertahanan> yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2xx1 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>  
Menteri Pertahanan,

Nama Penandatangan  
.....

**RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan <Kementerian Pertahanan> Tahun 2xx1 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

**1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selaendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.160.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.250.000.000. Realisasi Belanja Negara pada TA 2xx1 adalah sebesar Rp9.770.000.000 atau mencapai 98,36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp93.300.000.000

**2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2xx1 dicatat dan disajikan sebesar Rp100.205.500.000 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp13.232.500.000; Aset Tetap (neto) sebesar Rp84.852.000.000; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp141.000.000; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp1.980.000.000. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.497.000.000 dan Rp98.708.500.000.

**3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2xx1 adalah

Sebesar Rp1.539.000.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp58.996.500.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (57.457.500.000). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp48.000.000 dan defisit Rp(450.000.000) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(57859.500.000).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2xx1 adalah sebesar Rp60.947.160.000 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(57.859.500.000) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp95.620.840.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2xx1 adalah senilai Rp98.708.500.000

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar Akuntansi pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2xx1 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional, dan laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2xx1 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**<KEMENTERIAN PERTAHANAN>  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/  
30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2xx1			TA 2xx0
		Anggaran	Realisasi	% thd Anggaran	Realisasi
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.250.000.000	2.160.000.000	96,00	1.950.000.000
Jumlah Pendapatan		2.500.000.000	2.160.000.000	96,00	1.950.000.000
<b>BELANJA</b>					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	21.000.000.000	20.700.000.000	98,57	19.200.000.000
Belanja Barang	B.4	38.400.000.00	38.100.000.000	99,22	37.050.000.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5	600.000.000	600.000.000	100,00	420.000.000
Jumlah Belanja Operasi		60.000.000.000	59.400.000.000	99,00	56.670.000.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	18.000.000.000	17.700.000.000	98.33	9.000.000.000
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	6.900.000.000	6.600.000.000	95.65	4.500.000.000
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	5.400.000.000	5.250.000.000	97.22	3.150.000.000
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	1.800.000.000	1.740.000.000	96.67	1.200.000.000
Belanja Modal Lainnya	B.10	1.200.000.000	1.080.000.000	90.00	840.000.000
Jumlah Belanja modal		33.300.000.000	32.370.000.000	97.21	18.690.000.000
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>93.300.000.000</b>	<b>91.770.000.000</b>	<b>98.36</b>	<b>75.360.000.000</b>

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan

.....

**II. NERACA**

**<KEMENTERIAN PERTAHANAN>  
NERACA**

PER 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0

( Dalam Rupiah )

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	18.000.000	6.000.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	120.000.000	54.000.000
Kas pada BLU	C.4	2.500.000.000	1.500.000.000
Piutang PNBPN	C.5	360.000.000	330.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.6	216.000.000	144.000.000
Bagian Lancar Tagihan Penjual Ansuran	C.7	72.000.000	57.600.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pedek	C.8	(13.500.000)	(26.580.000)
Belanja Dibayar Dimuka	C.9	1.800.000.000	600.000.000
Persediaan	C.10	8.100.000.000	4.200.000.000
Jumlah Aset Lancar		13.232.500.000	6.865.020.000
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	108.000.000	270.000.000
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	36.000.000	151.200.000
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Panjang	C.13	(3.000.000)	(21.060.000)
Jumlah Piutang Jangka Panjang		141.000.000	400.140.000
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	36.300.000.000	18.000.000.000
Peralatan dan Mesin	C.15	12.786.000.000	6.300.000.000
Gedung dan Bangunan	C.16	47.970.000.000	42.000.000.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	2.040.000.000	300.000.000
Aset Tetap Lainnya	C.18	630.000.000	540.000.000
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.19	2.250.000.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(17.124.000.000)	(13.704.000.000)
Jumlah Aset Tetap		84.852.000.000	53.436.000.000
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.080.000.000	120.000.000
Aset Lain-Lain	C.22	1.170.000.000	660.000.000
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(270.000.000)	(180.000.000)
Jumlah Aset Lainnya		1.980.000.000	600.000.000
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>100.205.500.000</b>	<b>61.301.160.000</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	60.000.000	-
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	237.000.000	54.000.000
Pendapatan Diterima Dimuka	C.26	1.200.000.000	300.000.000
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>1.497.000.000</b>	<b>354.000.000</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.27	98.708.500.000	60.947.160.000
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>98.708.500.000</b>	<b>60.947.160.000</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>100.205.500.000</b>	<b>61.301.160.000</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan

.....

**III. LAPORAN OPERASIONAL**

**<KEMENTERIAN PERTAHANAN>  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/  
31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0**

URAIAN	CATATAN	(Dalam Rp)	
		2xx1	2xx0
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.539.000.000	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.539.000.000</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	20.820.000.000	-
Beban Persediaan	D.3	15.000.000.000	-
Beban Jasa	D.4	3.300.000.000	-
Beban Pemeliharaan	D.5	1.200.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.200.000.000	-
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	4.050.000.000	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	600.000.000	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	3.510.000.000	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	16.500.000	-
Beban Lain-Lain	D.11	300.000.000	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>58.996.500.000</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(57.457.500.000)</b>	<b>-</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D.12	72.000.000	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		(9.000.000)	-
Defisit Selisih Kurs		(15.000.000)	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>48.000.000</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(57.409.500.000)</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNPB	D.13	60.000.000	-
Beban Perjalanan Dinas		(180.000.000)	-
Beban Persediaan		(330.000.000)	-
<b>SURPLUS /DEFISIT</b>		<b>(57.859.500.000)</b>	<b>-</b>

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>  
Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan

.....

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

<KEMENTERIAN PERTAHANAN>  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/  
31 DESEMBER 2xx1 dan 2xx0

(dalam Rp)

URAIAN	CATATAN	2xx1	2xx0
EKUITAS AWAL	E.1	60.947.160.000	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(57.859.500.000)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3	300.000.000	-
KOREKSI ASET TETAP	E.4	900.000.000	-
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5	450.000.000	-
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6	(90.000.000)	-
JUMLAH LAIN-LAIN		1.560.000.000	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		94.060.840.000	-
EKUITAS AKHIR	E.7	98.708.500.000	60.947.160.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

.....

<Kementerian Pertahanan>  
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisi, Akumulasi Penyusutan/Amortisi Dan Nilai Buku Aset Tetap  
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2011

NO	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny		Beban Peny Tahun 2011	Akm Peny Per 31-12-2011	Nilai Buku Per 31-12-2011
				Per 31-12-2010	Per 31-12-2011			
A	Tanah							
1	Tanah		36.300.000.000	-	-	-	-	36.300.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>36.300.000.000</b>					<b>36.300.000.000</b>
B	Peralatan dan Mesin							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.400.000.000	74.550.000	200.000.000	274.550.000	1.125.400.000	3.000.000.000
2	Alat Kantor	5	4.000.000.000	200.000.000	800.000.000	1.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
3	Alat Rumah Tangga	5	5.421.000.000	530.000.000	772.350.000	1.302.350.000	4.118.650.000	4.118.650.000
4	Alat Komunikasi	5	250.000.000	25.000.000	50.000.000	75.000.000	175.000.000	175.000.000
5	Komputer Unit	4	1.200.000.000	150.000.000	300.000.000	450.000.000	750.000.000	750.000.000
6	Peralatan Komputer	4	500.000.000	62.500.000	125.000.000	187.500.000	312.500.000	312.500.000
7	Peralatan Olah Raga	3	15.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>12.786.000.000</b>	<b>1.047.050.000</b>	<b>2.252.350.000</b>	<b>3.299.400.000</b>	<b>9.486.600.000</b>	<b>9.486.600.000</b>
C	Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	22.970.000.000	5.831.200.000	459.400.000	6.290.600.000	16.679.400.000	16.679.400.000
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	25.000.000.000	6.500.000.000	500.000.000	7.000.000.000	18.000.000.000	18.000.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>47.970.000.000</b>	<b>12.331.200.000</b>	<b>9.595.400.000</b>	<b>13.290.600.000</b>	<b>34.679.400.000</b>	<b>34.679.400.000</b>
D	Jaringan, Irigasi dan jalan							
1	Jaringan Listrik	40	250.000.000	56.250.000	6.250.000	62.500.000	187.500.000	187.500.000
2	Jaringan Telepon	20	1.790.000.000	124.000.000	89.500.000	213.500.000	1.576.500.000	1.576.500.000
	<b>Jumlah</b>		<b>2.040.000.000</b>	<b>180.250.000</b>	<b>95.750.000</b>	<b>276.000.000</b>	<b>1.764.000.000</b>	<b>1.764.000.000</b>
E	Aset Tetap Lainnya							
1	Barang Bercorak Kesenian	4	450.000.000	145.500.000	112.500.000	258.000.000	192.000.000	192.000.000
2	Buku dan Koleksi Perpustakaan	-	180.000.000				180.000.000	180.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>630.000.000</b>	<b>145.500.000</b>	<b>112.500.000</b>	<b>258.000.000</b>	<b>372.000.000</b>	<b>372.000.000</b>
F	Konstruksi dalam Pengerjaan							
1	KDP Bangunan	-	2.250.000.000				2.250.000.000	2.250.000.000
	<b>Jumlah</b>		<b>2.250.000.000</b>				<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>
G	Aset Lainnya							
1	Aset Tidak Berwujud	-	1.080.000.000	80.000.000	40.000.000	120.000.000	960.000.000	960.000.000
2	Aset Lai-lain	-	1.170.000.000	100.000.000	50.000.000	150.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
	<b>Total</b>		<b>104.226.000.000</b>	<b>13.884.000.000</b>	<b>3.510.000.000</b>	<b>17.394.000.000</b>	<b>86.832.000.000</b>	<b>86.832.000.000</b>

No	KDP	Satker	No Kontrak	Nilai Kontrak	% Pymles	Nilai KDP	Sumber Dana
1	Gedung Tempat Kerja		No.02/KPA/VII/21015	1.100.000.000	80%	880.000.000	Rupiah Murni
2	Gedung Tempat Kerja		No.07/KPA/VI/21015	672.222.000	90%	605.000.000	Rupiah Murni
3	Gedung Tempat Tinggal		No.08/KPA/VIII/21015	300.000.000	75%	225.000.000	Rupiah Murni
4	Gedung Tempat Tinggal		No.12/KPA/XII/21015	600.000.000	90%	540.000.000	Pinj. LN
<b>Jumlah</b>				<b>2.672.222.000</b>		<b>2.250.000.000</b>	

<Nama Kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan  
 .....

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis <Satker>

Dasar  
Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis

<Kementerian Pertahanan> didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan keuangan Kementerian Pertahanan. Organisasi dan Tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Pertahanan.

<Kementerian Pertahanan> mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara akuntansi pemerintahan pusat dan pemberian bimbingan serta dukungan teknis dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Pertahanan. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan kementerian Pertahanan dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, <Kementerian Pertahanan> berkomitmen dengan visi **"mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual"**.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

- Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan

kepada para pemangku kepentingan

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2xx1 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh <Kementerian Pertahanan>.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis  
Akuntansi*

## A.3. Basis Akuntansi

<Kementerian Pertahanan> menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.4. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Pertahanan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2xx1 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan <Kementerian Pertahanan> adalah sebagai berikut :

##### (1) Pendapatan LRA

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi

Pendapatan

LRA

hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan LO* (2) Pendapatan LO

- Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan Pendapatan LO pada <Kementerian Pertahanan> adalah sebagai berikut :
  - Pendapatan Jasa pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan sewa gedung diakui secara proposional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

(Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan LO sesuai karakteristik, pendapatan masing-masing entitas)

- Akuntansi pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya)
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

*Belanja* (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban* (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset* (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya.

Aset                   Aset Lancar

- Lancar
- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
  - Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
  - Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
  - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
    - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
    - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset

Aset Tetap

Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10,000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang  
jangka  
panjang*

#### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lainnya
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa Aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, belanja yang masih harus dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek lainnya.
  - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas* (7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih* (8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan peggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan pertimbangan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

*Penyisihan Utang Tak Tertagih*

Kalitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2 Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan Aset Tetap* (9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap

didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :
  - a. Tanah
  - b. Kontruksi dalam pekerjaan (KDP)
  - c. Asep tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas pemerintah pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

Implementasi  
Akuntansi  
Pemerintah  
Berbasis  
Akrual  
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah meimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian Laporan Keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklafikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Realisasi

Pendapatan

Rp 2.160.000.000

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 adalah sebesar Rp2.160.000.000 atau mencapai 96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.250.000.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya pendapatan adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA.2xx1*

URAIAN	2xx1		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG
Pendapatan Jasa	2.100.000.000	2.040.000.000	97.14
Pendapatan Lain-Lain	150.000.000	120.000.000	80.00
Jumlah	2.250.000.000	2.160.000.000	96.00

Realisasi Pendapatan TA 2xx1 di bawah estimasi pendapatan disebabkan oleh berkurangnya permintaan jasa pelatihan akuntansi dan manajemen dari yang direncanakan. Selanjutnya, Realisasi Pendapatan untuk periode TA 2xx1 dibandingkan dengan TA 2xx0 terdapat kenaikan sebesar 10.77 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya Jasa Pendidikan dan Pelatihan Akuntansi dan Manajemen seiring dengan implementasi akuntansi berbasis akrual.

*Perbandingan Realisasi pendapatan TA 2xx1 dan 2xx0*

URAIAN	REALISASI T.A 2xx1	REALISASI T.A 2xx0	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	2,040 000 000	1.860.000.000	9,68
Pendapatan Lain-Lain	120.000.000	90.000.000	33,33
Jumlah	2.160.000.000	1.950.000.000	10,7

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp 91.770.000.000

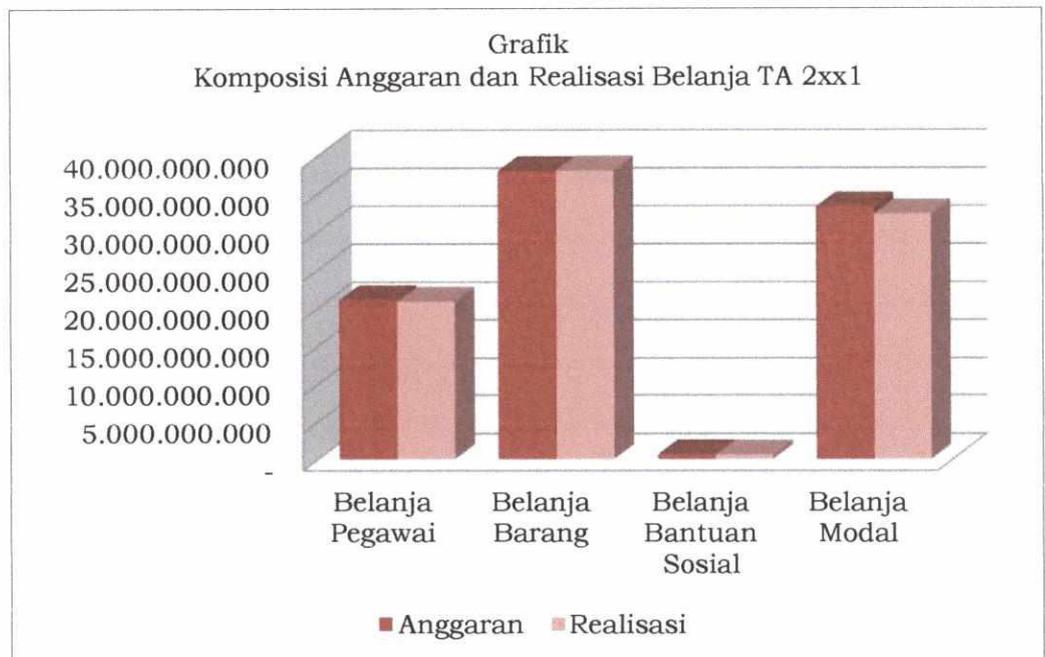
**B.2. Belanja**

Realisasi Belanja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada TA 2xx1 adalah sebesar Rp91.770.000.000 atau 98.36% dari anggaran belanja sebesar Rp93.300.000.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2xx0 tersaji sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2xx1*

URAIAN	2xx1		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.
Belanja Pegawai	21.000.000.000	20.850.000.000	99,29
Belanja Barang	38.400.000.000	38.100.000.000	99,22
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	600.000.000	100,00
Belanja Modal	33.300.000.000	32.370.000.000	97,21
Total Belanja Kotor	93.300.000.000	91.920.000.000	98,52
Pengembalian Belanja	-	(150.000.000)	
Jumlah	93.300.000.000	91.770.000.000	98,36

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2xx1 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	2xx1		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Percepatan Implementasi Akuntansi	39.000.000.000	38.700.000.000	99.23

Berbasis Akruaal			
Program Manajemen dan Dukungan TI di Bidang Pelaporan Keuangan	33.300.000.000	32.370.000.000	97.21.
Program Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Akuntansi pada KL	21.000.000.000	20.700.000.000	98.57
<b>Total Belanja</b>	<b>93.300.000.000</b>	<b>91.770.000.000</b>	<b>98.36</b>

Realisasi Belanja TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 21,78 persen dibandingkan pada TA 2xx0. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Meningkatnya kebutuhan belanja barang sebagai akibat dari implementasi akuntansi berbasis akrual,
2. Pengadaan belanja modal meningkat dalam rangka mendukung rencana kerja strategis,
3. Kegiatan pemberdayaan sosial yang dibiayai dari belanja bantuan sosial untuk penduduk daerah terpencil dan perbatasan negara yang mempunyai kerawanan sosial.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2xx1 dan 2xx0*

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI TA.2xx1</b>	<b>REALISASI TA.2xx0</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Belanja Pegawai	20.700.000.000	19.200.000.000	7,81
Belanja Barang	38.100.000.000	37.050.000.000	2,83
Belanja Bantuan Sosial	600.000.000	420.000.000	42,86
Belanja Modal	32.370.000.000	18.690.000.000	73,19
<b>Jumlah</b>	<b>91.770.000.000</b>	<b>75.360.000.000</b>	<b>21.78</b>

*Belanja Pegawai  
Rp.20.700.000.000*

**B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp20.700.000.000 dan Rp19.200.000.000 atau terjadi kenaikan sebesar 7,81%. Kenaikan ini disebabkan oleh antara lain:

1. Adanya kenaikan gaji dan tunjangan pegawai,
2. Adanya penambahan pegawai baru,
3. Kenaikan honor dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2xx1 dan TA 2xx0*

URAIAN	REALISASI TA 2xx1	REALISASI 2xx0	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunj.PNS	15.000.000.000	14.400.000.000	4,17
Belanja Gaji dan Tunj. Non PNS	2.700.000.000	2.100.000.000	28,57
Belanja Honorarium	1.800.000.000	1.650.000.000	9,09
Belanja Lembur	900.000.000	750.000.000	20,00
Belanja Vakasi	450.000.000	390.000.000	15,38
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>20.850.000.000</b>	<b>19.290.000.000</b>	<b>8,09</b>
Pengembalian Belj. Pegawai	(150.000.000)	(90.000.000)	66,67
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>20.700.000.000</b>	<b>19.200.000.000</b>	<b>7,81</b>

*Belanja Barang Rp  
38.100.000.000*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp38.100.000.000 dan Rp37.050.000.000. Realisasi Belanja Barang TA 2xx1 mengalami kenaikan 2,83 persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2xx0. Hal ini disebabkan antara lain adanya kenaikan belanja dalam rangka implementasi akuntansi berbasis akrual.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2xx1 dan TA 2xx0*

URAIAN	REALISASI TA 2xx1	REALISASI TA 2xx0	NAIK/ (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15.600.000.000	15.300.000.000	1,96
Belanja Barang Non Operasional	3.000.000.000	2.910.000.000	3,09
Belanja Jasa	4.500.000.000	4.440.000.000	1,35
Belanja Pemeliharaan	1.200.000.000	1.080.000.000	11,11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.200.000.000	9.900.000.000	3,03
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	3.600.000.000	3.420.000.000	5,26
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>38.100.000.000</b>	<b>37.050.000.000</b>	<b>2,83</b>
Pengembalian Belanja	-	-	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>38.100.000.000</b>	<b>37.050.000.000</b>	<b>2,83</b>

Belanja Bantuan  
Sosial  
Rp 600.000.000

### **B.5 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp600.000.000 dan Rp420.000.000. Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Belanja Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2xx1 dan TA 2xx0*

URAIAN	REALISASI TA. 2015	REALISASI TA. 2014	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui UO A	300.000,000	210.000,000	42.86
Penerima Bantuan melalui UO B	120.000.000	90.000,000	33.33
Penerima Bantuan melalui UO C	180.000,000	120.000,000	50.00
Jumlah Belanja Kotor	600.000,000	420.000,000	42.86
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>600.000,000</b>	<b>420.000,000</b>	<b>42.86</b>

Belanja Modal  
Tanah  
Rp17.700.000.000

### **B.6 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing masing sebesar Rp17.700.000.000 dan Rp9.000.000.000. Realisasi Belanja Modal Tanah diperuntukan bagi pendirian Klinik A serta tanah untuk sarana pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi di lingkungan UO Kemhan. Rincian dan perbandingan realisasi belanja modal tanah adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan 2xx0

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2xx1	REALISASI T.A. 2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	13.800.000.000	6.600.000.000	109,09
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	1.380.000.000	660.000.000	109,09
Belanja Pembuatan Sertifikat Tanah	1.740.000.000	1.260.000.000	38,10
Belanja Modal pengurukan dan Pematangan Tanah	780.000.000	480.000.000	62,50
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	17.700.000.000	9.000.000.000	96,67
<b>Jumlah Belanja</b>			

Belanja Modal dan Peralatan dan Mesin  
Rp. 6.600.000.000

**B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp6.600.000.000 dan Rp4.500.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 46,67 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh penambahan perangkat komputer dan fasilitas pendukungnya.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2xx1 dan TA 2xx0

Uraian	Realisasi T.A. 2xx1	Realisasi Ta.2xx0	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.100.000.000	1.590.000.000	32,08
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan	2.400.000.000	1.500.000.000	60,00
Belanja Modal Upah dan Honor pengelola Peralatan dan Mesin	300.000.000	210.000.000	42,86
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	1.800.000.000	1.200.000.000	50,00
Jumlah Belanja	6.600.000.000	4.500.000.000	46,67
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>46,67</b>

Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
Rp 5.250.000.000

**B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp5.250.000.000 dan Rp3.150.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 66,67 persen

dibandingkan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2xx0. Hal ini disebabkan penambahan gedung baru untuk Klinik A dan gedung pelatihan pada lingkungan UO Kemhan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
TA 2xx1 dan 2xx0*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A 2xx1	T.A 2xx0	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4,000,000,000	2,500,000,000	60.00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan	400,000,000	150,000,000	166.67
Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	350,000,000	250,000,000	40.00
Belanja Modal Pengosongan Dan Pembongkaran	350,000,000	150,000,000	133.33
Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	150,000,000	100,000,000	50.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>5,250,000,000</b>	<b>3,150,000,000</b>	<b>66.67</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
<b>J u m l a h</b>	<b>5,250,000,000</b>	<b>3,150,000,000</b>	<b>66.67</b>

*Belanja Modal  
Jalan, Irigasi, dan  
Jaringan  
Rp1.740.000.000*

**B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.740.000.000 dan Rp1.200.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 45 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan penambahan jaringan teknologi informasi di semua satuan kerja lingkup Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam rangka mendukung rencana strategis.

*Perbandingan Realisasi Belanja modal TA 2xx1 dan TA 2xx0*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2xx1	T.A 2xx0	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Jaringan	1,560,000,000	1,080,000,000	44.44
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis	180,000,000	120,000,000	50.00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1,740,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>45.00</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0.00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1,740,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>45.00</b>

Belanja Modal  
Lainnya  
Rp 1.080.000.000

**B.10 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk TA 2xx1 dan TA 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.080.000.000 dan Rp840.000.000. Realisasi Belanja Modal TA 2xx1 mengalami kenaikan sebesar 28,57 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2xx0. Hal ini disebabkan pengadaan *software* untuk implementasi pendapatan berbasis akrual.

*Belanja Modal Lainnya*

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2xx1	T.A 2xx0	NAIK (TURUN) %
Belanja Software	960.000.000	770.000.000	24,68
Belanja Buku dan Koleksi	120.000.000	70.000.000	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>840.000.000</b>	<b>28,57</b>
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.080.000.000</b>	<b>840.000.000</b>	<b>28,57</b>

**C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**

Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp60.000.000

**C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

(Jabatan Bendahara Pengeluaran harus dengan Surat Keputusan) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran*

KETERANGAN	TAHUN 2xx1	TAHUN 2xx0
Rekening Bank	42.000.000	-
Uang Tunai	18.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>60.000.000</b>	-

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran*

Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp. 18.000.000

**C.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

(Jabatan Bendahara Penerimaan harus dengan Surat Keputusan) Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar masing-masing Rp18.000.000 dan Rp6.000.000. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Kas Lainnya dan  
Setara Kas  
Rp 120.000.000

**C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp120.000.000 dan Rp54.000.000.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang

tunai. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas*

Uraian	Saldo	
	TH 2xx1	TH 2xx0
Jasa Giro yang belum disetor ke kas negara	3.000.000	1.800.000
Pajak PPh yang belum disetor	9.000.000	5.700.000
Honor kegiatan yang belum dibagikan	108.000.000	46.500.000
<b>Jumlah</b>	<b>120.000.000</b>	<b>54.000.000</b>

*Kas pada BLU*  
*Rp2.500.000.000*

**C.4. Kas pada Badan Layanan Umum**

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.500.000.000 dan Rp 1.500.000.000 yang merupakan kas pada Satuan Kerja BLU Pusat Nasional Akuntansi.

*Piutang Bukan*  
*Pajak*  
*Rp 360.000.000*

**C.5. Piutang Bukan Pajak**

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp360.000.000 dan Rp330.000.000. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang Bukan Pajak*

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0
Piutang PNBPN	315.000.000	300.000.000
Piutang Lainnya	45.000.000	30.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>360.000.000</b>	<b>330.000.000</b>

*Bagia Lancar*  
*Tagihan TP/TGR*  
*Rp216.000.000*

**C.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp216.000.000 dan

Rp144.000.000. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR*

No	Nama	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0
1	UO A	100.000.000	50.000.000
2	UO B	116.000.000	94.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>216.000.000</b>	<b>144.000.000</b>

Bagian Lancar TPA  
Rp72.000.000

**C.7. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp72.000.000. dan Rp57.600.000. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)*

No	Nama	TH 2xx1	TH 2xx0
1	UO A	36.000.000	36.000.000
2	UO C	36.000.000	21.600.000
<b>Jumlah</b>		<b>72.000.000</b>	<b>57.600.000</b>

Penyisihan Piutang  
Tak Tertagih –  
Piutang JK Pendek  
Rp(13.500.000)

**C.8 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Pendek**

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(13.500.000) dan Rp(26.580.000).

Penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK</b>			
Lancar	300.000.000	0.50%	1.500.000
Kurang Lancar	60.000.000	10%	6.000.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-

<b>Jumlah</b>	<b>360.000.000</b>		<b>7.500.000</b>
<b>BAGIAN LANCAR TP/TGR</b>			
Lancar	180.000.000	0.50%	900.000
Kurang Lancar	36.000.000	10%	3.600.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>216.000.000</b>		<b>4.500.000</b>
<b>BAGIAN LANCAR TPA</b>			
Lancar	60.000.000	0.50%	300.000
Kurang Lancar	12.000.000	10%	1.200.000
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>72.000.000</b>		<b>1.500.000</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>648.000.000</b>		<b>13.500.000</b>

Belanja Dibayar

Dimuka

Rp1.800.000.000

### C.9 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp1.800.000.000. dan Rp600.000.000. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Di bayar Di Muka

<b>Jenis</b>	<b>THN 2xx1</b>	<b>THN 2xx0</b>
Pembayaran Internet	180.000.000	180.000.000
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	420.000.000	420.000.000
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan	1.200.000.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>600.000.000</b>

Persediaan

Rp8.100.000.000

### C.10. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing adalah sebesar Rp8.100.000.000 dan Rp4.200.000.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	TH 2xx1	TH 2xx0
Barang Konsumsi	4.200.000.000	2.250.000.000
Barang untuk Pemeliharaan	1.800.000.000	900.000.000
Suku Cadang	1.020.000.000	540.000.000
Persediaan Lainnya	1.080.000.000	510.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.100.000.000</b>	<b>4.200.000.000</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Terdapat barang konsumsi senilai Rp15.000.000 berada dalam kondisi rusak dan tidak disajikan dalam Persediaan.

Tagihan TP/TGR  
Rp108.000.000

**C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing-masing sebesar Rp 108.000.000. dan Rp270.000.000. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TP/TGR

Debitur	Tahun 2xx1	Tahun 2xx0	Keterangan
UO A	50.000.000	100.000.000	TGR
UO B	58.000.000	170.000.000	TP
<b>Jumlah</b>	<b>108.000.000</b>	<b>270.000.000</b>	

TPA Rp24.000.000

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp36.000.000 dan Rp151.200.000. Rincian TPA untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian TPA

No	Nama	TH 2xx1	TH 2xx0
1	UO A	18.000.000	72.000.000
2	UO B	18.000.000	79.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>24.000.000</b>	<b>151.200.000</b>

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih —  
Piutang Jangka  
Panjang  
Rp(3.000.000)

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(3.000.000) dan Rp(21.060.000).

Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Ganti Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rp6.000.000 (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Jangka Panjang

Kualitas Piutang	Nilai Piutang JK Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	90.000.000	0.50%	450.000
Kurang Lancar	18.000.000	10%	1.800.000
Diragukan		50%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>108.000.000</b>		<b>2.250.000</b>
Tagihan PA			
Lancar	30.000.000	0.50%	150.000
Kurang Lancar	6.000.000	10%	600.000
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
<b>Jumlah</b>	<b>36.000.000</b>		<b>750.000</b>
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	<b>144.000.000</b>		<b>3.000.000</b>

Tanah  
Rp36.300.000.000.

#### C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kementerian Pertahanan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp36.300.000.000 dan Rp18.000.000.000

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	Rp	18.000.000.000
Mutasi Tambah	Rp	
Pembelian	Rp	17.700.000.000
Hibah	Rp	600.000.000
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2xx1	Rp	36.300.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	Rp	36.300.000.000

Terdapat Tanah pada Eselon 1 /Unit Organisasi seluas 3000 m2 senilai Rp3.000.000.000 pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga.

Peralatan dan Mesin  
Rp12.786.000.000

#### C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp12.786.000.000 dan Rp6.300.000.000. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2xx0	Rp	6.300.000.000
Mutasi Tambah	Rp	
Pembelian	Rp	6.600.000.000
Hibah	Rp	900.000.000
Reklasifikasi	Rp	150.000.000
Mutasi Kurang	Rp	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	(300.000.000)
Penghapusan	Rp	(450.000.000)
Transfer Keluar	Rp	(300.000.000)
Koreksi Pencatatan	Rp	(114.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	Rp	12.786.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	Rp	(3.299.400.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	Rp	9.486.600.000

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

- a. Penambahan dari pembelian komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp600.000.000.

- b. Pengadaan alat angkutan darat bermotor dengan total nilai sebesar Rp6.000.000.000.
- c. Penambahan melalui hibah sebesar Rp900.000.000 merupakan hibah alat kantor dan rumah tangga yang pencatatannya berdasarkan nilai pada berita acara serah terima (BAST). Hibah tersebut sudah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU). Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.
- d. Penambahan melalui reklasifikasi dari Aset Lainnya merupakan pengaktifan kembali komputer unit yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp150.000.000.
- e. Pengurangan melalui penghentian peralatan dan mesin dari penggunaannya sebesar Rp300.000.000 dan diklasifikasi dari aset tetap ke aset lain-lain. Peralatan dan mesin tersebut berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	50.000.000
2	Alat Studio	115.000.000
3	Alat Kesehatan Umum	45.000.000
4	Komputer Unit	55.000.000
5	Peralatan Komputer	35.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>300.000.000</b>

- f. Pengurangan sebesar Rp450.000.000 merupakan penghapusan berupa :

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	250.000.000
4	Komputer Unit	150.000.000
5	Peralatan Komputer	50.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>450.000.000</b>

- g. Pengurangan melalui transfer keluar berupa komputer unit dan peralatan komputer senilai Rp300.000.000 ke Komite Akuntansi Indonesia
- h. Pengurangan melalui koreksi karena kesalahan pencatatan senilai Rp114.000.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2xx1 disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan  
Bangunan  
Rp47.970.000.000

### C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp47.970.000.000 dan Rp42.000.000.000

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2xx0</b>	<b>42.000.000.000</b>
Mutasi tambah	
Pembangunan Gedung	5.250.000.000
Koreksi Nilai	900.000.000
Mutasi Kurang	0
Koreksi Nilai	(180.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2xx1</b>	<b>47.970.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(13.290.600.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2xx1</b>	<b>34.679.400.000</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp5.250.000.000 untuk bangunan dan gedung.
- Penambahan melalui koreksi nilai sebesar Rp900.000.000 yang merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan dari tahun anggaran yang lalu.
- Pengurangan berupa koreksi pencatatan sebesar Rp180.000.000 yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset tetap.

Dalam aset gedung dan bangunan tidak termasuk musholla yang dibangun secara swadaya oleh Pegawai Kementerian Pertahanan dan pada saat ini sedang dilakukan identifikasi data untuk proses pengesahan hibah.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan  
dan Irigasi  
Rp2.040.000.000

### C.17 Jalan Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp2.040.000.000 dan

Rp300.000.0000. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan TI. Mutasi transaksi terhadap Jalan Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2xx0</b>	<b>300.000.000</b>
Mutasi tambah	
Pengembangan Jaringan Informasi	1.740.000.000
Mutasi Kurang	0
Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2xx1	2.040.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(276.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	1.764.000.000

Transaksi penambahan berupa pengembangan jaringan teknologi informasi di seluruh lingkup Kementerian Pertahanan dalam rangka mempercepat pelaporan keuangan secara elektronik.

Rincian aset tetap Jalan. Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya  
Rp 630.000.000

### **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp630.000.000 dan 540.000.000. Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada tahun 2xx1 keseluruhannya berasal dari pengadaan sebesar Rp120.000.000 termasuk di dalamnya adalah pembelian alai musik tradisional sebesar Rp25.000.000 dan koleksi buku perpustakaan senilai Rp95.000.000. Pengurangan Rp30.000.000 merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran sebagai berikut :

<b>Saldo per 31 Desember 2xx0</b>	<b>540.000.000</b>
Mutasi tambah	
Penambahan Aset Tetap Lainnya	120.000.000
Mutasi Kurang	0
Koreksi Nilai	(30.000.000)
Saldo per 31 Desember 2xx1	630.000.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2xx1	(258.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2xx1	372.000.000

Konstruksi dalam  
Pengerjaan  
Rp2.250.000.000

### C.19. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp2.250.000.000 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan tempat kerja dan tempat tinggal yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp(17.124.000.000)

### C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing Rp(17.124.000.000) dan Rp(13.704.000.000). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2xx1. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Al Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 12.786.000.000	Rp 3.299.400.000	Rp 9.486.600.000
2	Gedung dan Bangunan	Rp 47.970.000.000	Rp 13.290.600.000	Rp 34.679.400.000
3	Jalan, irigasi dan Jaringan	Rp 2.040.000.000	Rp 276.000.000	Rp 1.764.000.000
4	Aset Tetap Lainnya	Rp 630.000.000	Rp 258.000.000	Rp 372.000.000
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Rp 63.426.000.000</b>	<b>Rp 17.124.000.000</b>	<b>Rp 46.302.000.000</b>

Aset Tak Berwujud  
Rp1.080.000.000

### C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2xx1 dan 31 Desember 2xx0 adalah Rp1.080.000.000 dan Rp120.000.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

dimiliki tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2xx1 adalah sebagai berikut

Rincian Aset Tak Berwujud

No	Uraian		Nilai
1	Software Komputer	Rp	600.000.000
2	ATB Lainnya	Rp	480.000.000
Jurnal Nilai Perolehan Per 31 Desember		Rp	1.080.000.000
Amortisi ATB s.d 31 Desember 2xx1		Rp	(120.000.000)
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>960.000.000</b>

Aset Lain-Lain

Rp 1.170.000.000

**C.22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah Rp1.170.000.000 dan Rp660.000.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kementerian Pertahanan serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2xx0</b>	<b>660.000.000</b>
Mutasi tambah	
- Reklasifikasi dari aset tetap	750.000.000
Mutasi Kurang	
- Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	(150.000.000)
- Penghapusan BMN	(90.000.000)
<b>Saldo per 31 Desember 2xx1</b>	<b>1.170.000.000</b>
Akumulasi Penyusutan	(150.000.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2xx1</b>	<b>1.020.000.000</b>

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penambahan dari reklasifikasi aset tetap melalui penghentian peralatan dan mesin dari penggunaannya sebesar Rp300.000.000 Peralatan dan mesin tersebut berupa :

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Bermotor	50.000.000
2	Alat Studio	115.000.000
3	Alat Kesehatan Umum	45.000.000
4	Komputer Unit	55.000.000
5	Peralatan Komputer	35.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>300.000.000</b>

- b. Penambahan dari rekiasifikasi aset tetap melalui usulan penghapusan sebesar Rp450.000.000 berupa:

No	Sub Kelompok	Harga Perolehan
1	Alat Darat Darat Bermotor	250.000.00
2	Komputer Unit	150.000.00
3	Peralatan Komputer	50.000.00
<b>Jumlah</b>		<b>450.000.000</b>

- c. Pengurangan melalui rekiasifikasi dari aset lainnya ke peralatan dan mesin merupakan pengaktifan kembali komputer unit yang telah dihentikan penggunaannya sebesar Rp 150.000.000
- d. Pengurangan berupa penghapusan sebesar Rp90.000.000 merupakan penghapusan alat angkutan darat bermotor melalui penjualan.

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp (270.000.000)

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(270.000.000) dan Rp(180.000.000). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adaiah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwuiud			
1	Software Komputer	Rp 600.000.000	Rp 80.000.000	Rp 520.000.000
2	ATB Lainnya	Rp 480.000.000	Rp 40.000.000	Ro 440.000.000
Jumlah		Rp 1.080.000.000	Rp 120.000.000	Rp 960.000.000
B	Aset Lainnya	Rp 1.170.000.000	Rp 150.000.000	Rp 1.020.000.000
Jumlah		Rp 1.170.000.000	Rp 150.000.000	Rp 1.020.000.000
Total		Rp 2.250.000.000	Rp 270.000.000	Rp 1.980.000.000

Uang Muka dari  
KPPN  
Rp 60.000.000

### C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing masing sebesar Rp60.000.000 dan Rp0. Uang

Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut:

Rincian Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2xx1
1	<Eselon I/UO A>	30.000.000
2	<Eselon I/UO B>	9.000.000
3	<Eselon I/UO C>	21.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>60.000.000</b>

Utang Kepada  
Pihak Ketiga  
Rp 237.000.000

### C.25. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 masing masing sebesar Rp237.000.000 dan Rp54.000.000. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua betas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kementerian Pertahanan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian		Jumlah
1	Belanja Pegawai yang belum dibayar	Rp	120.000.000
2	Belanja Barang yang belum dibayar	Rp	108.000.000
3	Belanja Lainnya yang Belum dibayarkan	Rp	9.000.000
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>237.000.000</b>

Pendapatan  
Diterima dimuka  
Rp1.200.000.000

### C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 sebesar Rp1.200.000.000 dan Rp300.000.000. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Pendapatan di terima di Muka

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Penjelasan</b>
Badan Swasta	Rp 900.000.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp 112.500.000	Penyusunan Neraca Awal
Badan Lainnya	Rp 187.500.000	Jasa Pelatihan Akuntansi
<b>Total</b>	<b>Rp1.200.000.000</b>	

Ekuitas

Rp98.708.500.000

**C.27 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp98.708.500.000 dan Rp60.947.160.000. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

Pendapatan PNB  
RP 1.539.000.000

**D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah sebesar Rp1.539.000.000 dan Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2xx1 dan 2xx0*

Jenis Pendapatan	TH 2xx1	TH 2xx0	% KEN/PEN
Pendapatan Jasa	1.188.000.000	-	-
Pendapatan Lain-lain	351.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.539.000.000</b>	-	-

Pendapatan Jasa adalah merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pelatihan akuntansi dan desain sistem akuntansi. Sedangkan pendapatan lain-lain-LO merupakan pengembalian beban yang berasal dari transaksi tahun 2xx0.

Beban Pegawai  
Rp20.820.000.000

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing masing sebesar Rp20.820.000.000 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai Tahun 2xx1 dan 2xx0*

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Gaji	13.800.000.000	-	%
Beban Tunjangan-Tunjangan	5.670.000.000	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	2.250.000.000	-	-
Beban Lembur	900.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>20.820.000.000</b>		

Beban Persediaan  
Rp15.000.000.000

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing masing sebesar Rp15.000.000.000 dan 0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang

yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan*

Uraian Jenis Belanja	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	10.800.000.000	-	-
Beban Persediaan Bahan	1.200.000.000	-	-
Beban Persediaan Suku Cadang	2.400.000.000	-	-
Beban Persediaan Lainnya	600.000.000	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>15.000.000.000</b>	-	-

Beban Jasa

Rp 3.300.000.000

#### D.4 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp3.300.000.000 dan Rp0. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Jasa Tahun 2xx1 dan 2xx0*

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Langganan Daya dan	390.000.000	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	186.000.000	-	-
Beban Jasa Konsultan	600.000.000	-	-
Beban Jasa Profesi	2.048.000.000	-	-
Beban Jasa Lainnya	78.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.300.000.000</b>	-	-

Beban

Pemeliharaan

Rp1.200.000.000

#### D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp1.200.000.000 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut

*Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2xx1 dan 2xx0*

Uraian jenis beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	720.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	420.000.000	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	60.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.200.000.000</b>	-	-

Beban Perjalanan  
Dinas  
Rp10.200.000.000

#### D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp10.200.000.000 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	5.550.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.100.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	1.950.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	600.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>10.200.000.0</b>	-	-

Beban Barang  
untuk Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp 4.050.000.000

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp4.050.000.000 dan Rp0. Beban tersebut merupakan bagian dari program implementasi akuntansi berbasis akrual dengan memberikan buku-buku antara lain Standar Akuntansi Pemerintahan, Dasar Dasar Akuntansi dan Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah, serta peralatan pengajaran. Persediaan tersebut diserahkan baik kepada entitas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	1.700.000.000	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	2.350.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.050.000.00</b>	-	-

Beban Bantuan  
Sosial  
Rp600.000.000

### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp600.000.000 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Jenis Beban	TH 2xx1	TH 2xx0	Naik (Turun) %
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	90.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	180.000.000	-	-
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	330.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>600.000.000</b>	-	-

Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp 3.510.000.000

### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp3.510 000.000 dan Rp0. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.252.350.000	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	959.400.000	-	-
Beban Penyusutan Jalan, irigasi., Jaringan	95.750.000	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	112.500.000	-	-
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>3.420.000.000</b>	-	-
Beban Amortisasi Aplikasi	60.000.000	-	-
Beban Amortisasi ATB lainnya	30.000.000	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>90.000.000</b>	-	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>3.510.000.000</b>	-	-

Beban Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih  
Rp16.500.000

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp16.500.000 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2xx1 dan 2xx0

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	13.500.000	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	3.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>16.500.000</b>	-	-

Beban Lain-Lain  
Rp300.000.000

#### D.11. Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-Lain untuk Tahun 2xx1 dan Tahun 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp300.000.000 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun 2xx1 dan 2xx0

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN) %
Beban Aset Extrakomtabel Peralatan dan Mesin	180.000.000	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Gedung dan Bangunan	90.000.000	-	-
Beban Aset Extrakomtabel Aset Tetap Lainnya	30.000.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>	-	-

Surplus Devisit  
dari Kegiatan Non  
Operasional  
Rp48.000.000

#### D.12 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dan Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2xx1 dan 2xx0

URAIAN	TH 2xx1	TH 2xx0	NAIK (TURUN) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Angkut Darat Bermotor	72.000.000	-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan Alat Kantor	(9.000.000)	-	-
Defisit Selisih Kurs	(15.000.000)	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	48.000.000	-	-

Pos-Pos uar Biasa  
Rp 450.000.000

**D.13 Pos-Pos Luar Biasa**

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2xx1 dan 2xx0

Uraian	TH 2xx1	TH 2xx0	Nalk (Turun)
Pendapatan PNBPN	60.000.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas	(180.000.000)	-	-
Beban Persediaan	(330.000.000)	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>(450.000.000)</b>	-	-

Pendapatan PNBPN berasal dari penjualan peralatan dan mesin yang rusak pasca bencana di Papua dan Sumatera Utara. Sedangkan Beban Perjalanan Dinas dan Beban Persediaan adalah merupakan beban-beban yang digunakan secara langsung dalam masa tanggap darurat bencana.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Ekuitas Awal  
Rp 60.947.160.000

**E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar 60.947.160.000 dan Rp0.

Surplus (Defisit) LO  
Rp(57.859.500.000)

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah defisit sebesar Rp(57.859.500.000) dan Rp0. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa

Koreksi nilai  
persediaan  
Rp 300.000.000

**E.3 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp.300.000.000 dan Rp0. Rincian koreksi nilai persediaan untuk tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

<b>Jenis Persediaan</b>	<b>Koreksi</b>
1. Barang Kosumsi	150.000.000
2. Suku Cadang	45.000.000
3. Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	90.000.000
4. Barang Persediaan Lainnya	15.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>

Koreksi Aset Tetap  
Rp900.000.000

**E.4 Koreksi Aset Tetap**

Koreksi Nilai Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya. Koreksi Penilaian aset tetap untuk tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp900.000.000 dan Rp0. Rincian untuk Tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi aset Tetap*

<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Koreksi</b>
1. Bangunan Gedung Tempat Kerja	825.000.000
2. Bangunan Gedung Tempat Tinggal	75.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>900.000.000</b>

Koreksi Atas Beban  
Rp450.000.000

### E.5 Koreksi Atas Beban

Koreksi Atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Beban untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp450.000.000 dan Rp0. Rincian untuk tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Beban

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Beban Pegawai	150.000.000
Beban Perjalanan Dinas	(50.000.000)
Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat	350.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>450.000.000</b>

Koreksi Atas  
Pendapatan  
Rp(90.000.000)

### E.6 Koreksi Atas Pendapatan

Koreksi Atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas Pendapatan untuk Tahun 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp(90.000.000) dan Rp0. Rincian Koreksi Atas Pendapatan untuk Tahun 2xx1 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Atas Pendapatan

Jenis Aset Tetap	Jumlah Koreksi
Pendapatan Jasa	60.000.000
Pendapatan Lainnya	30.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>90.000.000</b>

Ekuitas Akhir  
Rp98.708.500.000

### E.7 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2xx1 dan 2xx0 adalah masing-masing sebesar Rp98.708.500.000 dan Rp60.947.160.000.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Pada tanggal 15 Januari 2xx1 telah terjadi bencana alam berupa banjir yang menyebabkan sebagian gedung kantor terendam banjir. Kejadian tersebut mengakibatkan masalah serius dalam pemberian pelayanan kepada *stakeholder*. Jaringan komputer, instalasi listrik, dan berbagai peralatan kantor mengalami kerusakan. Untuk menanggulangi hal tersebut Menteri Pertahanan telah membentuk tim untuk mengidentifikasi kerusakan yang diakibatkan oleh banjir tersebut dan menginstruksikan untuk tetap memberikan pelayanan kepada *stakeholder*.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: Kep/xxx/xxx/xxxx tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran Kementerian Pertahanan pada tanggal 05 Juli 2xx0 telah dilakukan penggantian Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

<b>Satker</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
Satker A	Kuasa Pengguna Anggaran	Denny SF	Mutiara
	Pejabat Pembuat Komitmen	Fitra	Meini
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji SPM	Komang	Fajar
	Bendahara	Yessy	Martha
Satker B	Kuasa Pengguna Anggaran	Sutawijaya	Okto
	Pejabat Pembuat Komitmen	Diana	Tema
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji	Fajar	Augusta
	Bendahara	Yanuraga	Jumina
Satker F	Kuasa Pengguna Anggaran	Fathin	Made
	Pejabat Pembuat Komitmen	Aydin	Sagita
	Pejabat Penanda Tangan/Penguji	Zaflan	Koming
	Bendahara	Rizvan	Ayunda

# FORMAT 10

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENDAPATAN  
DAN HIBAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MELALUI KPPN DAN BUN  
UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/30 JUNI 2xx1/30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1\*)  
(DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPK W.01  
Tanggal :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			%REAL. PEND.	
			TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU	PENGEMBALIAN S.D TRIWULAN INI		JUMLAH NETTO S.D TRIWULAN INI
1	2	3	4	5	6	7	8
I XX	I. IKHTISAR MENURUT MAP						
XXX	PENERIMAANDALAM NEGERI						
XXXX	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
XXXX	PENDAPATAN PNBP LAINNYA						
XXXX	Uraian Pendapatan						
XXXXXX	Uraian Pendapatan						
	Uraian Pendapatan						
	Jumlah Penerimaan XXXXXX						
	Jumlah Penerimaan XXXX						
	Jumlah Penerimaan XXX						
	Jumlah Penerimaan XX						
	JUMLAH Penerimaan Dalam Negeri						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH						
XX	II. IKHTISAR MENURUT ESELON BAKU II/BPP/P TNI/PUSKU TNI/DITKU/DISKU ANGGARAN/BIDKUKEM PUSKU KEMHAN						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH						
XXXX	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH WILAYAH						
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH						

FORMAT 11

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH  
 PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN HIBAH KEMENTERIAN PERTAHANAN MELALUI KPPN DAN BUN  
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/30 JUNI 2xx1/30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1 \*)  
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRPK W.01  
 Tanggal :  
 Halaman :  
 Prig id :

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN			%REAL PEND.
			JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN LALU	TRIWULAN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN INI	
1	2	3	4	5	6	7
I XX	I. IKHTISAR MENURUT MAP					
XXX	PENERIMAANDALAM NEGERI					
XXXX	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
XXXXX	PENDAPATAN PNBP LAINNYA					
XXXXX	URAIAN PENDAPATAN					
XXXXXXX	URAIAN PENDAPATAN					
	URAIAN PENDAPATAN					
	Jumlah Penerimaan XXXXXXX					
	Jumlah Penerimaan XXXXX					
	Jumlah Penerimaan XXX					
	Jumlah Penerimaan XX					
	JUMLAH Penerimaan Dalam Negeri					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					
XX	II. IKHTISAR MENURUT ESELON					
	BAKU II/BPP/P TNI/PUSKU TNI/DITKU/DISKU ANGKATAN/BIDKUKEM PUSKU KEMHAN					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					
XXXX	III. IKKHTISAR MENURUT PUSAT-WILAYAH WILAYAH					
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH					

FORMAT 12

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN MELALUI KPPN DAN BUN  
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/30 JUNI 2xx1/30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1 \*)  
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBK W.01  
 Tanggal :  
 Halaman :  
 Prtg id :

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI BELANJA				%REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				5	6	7	8 = 6-7		
		ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	TRIWULAN INI	JUMLAH S.D TRIWULAN INI	PENGEMBALIAN S.D TRIWULAN INI	JUMLAH NETTO S.D TRIWULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9 (6 : 4)	10 (4 - 6)
X	I IKHTISARMENURUT SUMBER DANA								
XX	URAIAN SUMBER DANA								
XX	URAIAN CARA PENARIKAN								
XX	URAIAN FUNGSI								
XX	URAIAN SUB FUNGSI								
XX	Uraian Program								
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI XX.XX								
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX								
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX								
	JUMLAH BELANJA								
XXXX	II. IKHTISAR MENURUT ESELON I								
	URAIAN BAKU II/BPF/PUSKU TNI/DITKU/DISKU								
	ANGKATAN/BIDKUKEM PUSKU KEMHAN								
	JUMLAH BELANJA								
	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH								
XXXXXX	JUMLAH BELANJA								
	IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK								
	URAIAN KELOMPOK BELANJA								
	Uraian Sub Kelompok Belanja								
	Uraian Belanja								
XX XXXX	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA XXXX								
XXXXXX	JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX								
	JUMLAH BELANJA								

FORMAT 13

LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA  
 PENGEMBALIAN BELANJA KEMENTERIAN PERTAHANAN MELALUI KPPN DAN BUN  
 UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/30 JUNI 2xx1/30 SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1\*)  
 (DALAM RUPIAH)

Kode Lap : LRBK W.01  
 Tanggal :  
 Halaman :  
 Prtg.id :

KODE	URAIAN	3	4	REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	JUMLAH S.D TRIWULAN YANG LALU		
1	2	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8 (7 : 4)	9 (4 - 7)
X	I TRANSAKSI MENURUT SUMBER DANA							
XX	URAIAN SUMBER DANA							
XX	URAIAN CARA PENARIKAN							
XX	URAIAN FUNGSI							
XX	URAIAN SUB FUNGSI							
XX	Uraian Program							
	JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI XX.XX							
	JUMLAH BELANJA FUNGSI XX							
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA XX							
	JUMLAH BELANJA							
XX	II. IKHTISAR MENURUT ESELON I							
	URAIAN BAKU II/BPP/PUSKU TNI/DITKU/DISKU							
	ANGKATAN/BIDKUKEM PUSKU KEMHAN							
	JUMLAH BELANJA							
	III. IKHTISAR MENURUT PUSAT WILAYAH							
	URAIAN WILAYAH							
XXXX	JUMLAH BELANJA							
	IV. IKHTISAR MENURUT JENIS BELANJA-MAK							
	URAIAN KELOMPOK BELANJA							
	Uraian Sub Kelompok Belanja							
	Uraian Belanja							
XX XXXX	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA XXXX							
XXXXXXXX	JUMLAH KELOMPOK BELANJA XX							
	JUMLAH BELANJA							

\*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 14

NERACA PERCOBAAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PER 31 MARET/30 JUNI/30 SEPTEMBER/31 DESEMBER 2XX1\*)

Kode Lap : NPSAIKPS  
Tanggal :  
Halaman :  
Prig id :

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :

KODE TRANSAKSI	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0	113712	Piutang dari KPPN		XX
0	212511	Utang kepada KPPN	XX	
3	423141	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri		XX
3	511161	Belanja Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	XX	
3	511169	Belanja Pembulatan Gaji Pokok PNS TNI/POLRI	XX	
3	511171	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/POLRI	XX	
3	511172	Belanja Tunj. Anak PNS TNI/POLRI	XX	
			XXX	XXX

\*) coret yang tidak perlu







**4. Lap Barang Bersejarah**

KEMENTERIAN :

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
 BARANG BERSEJARAH  
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2xx1

AKUN NERACA / KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER		MUTASI		SALDO PER	
		1 JANUARI 2XX1	KUANTITAS	BERTAMBAH	BERKURANG	31 DESEMBER 2XX1	KUANTITAS
KODE	URAIAN			KUANTITAS			
1	2	3	4	5	6	7	

Tanggal :  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : LBSSKT

Jakarta, .....2xx1  
 Penanggung Jawab UAKPA

Nama Penandatanganan  
 .....









**9. Lap Penyusutan Gabungan**

KEMENTERIAN :

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN  
PENYUSUTAN GABUNGAN INTRAKONTABEL DAN EKSTRAKONTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2XX1

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG	SAT	SALDO PER			NILAI BUKU
		31 DESEMBER	AK.PENYUSUTAN	2XX1	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AK.PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6
					7
	TOTAL				

Tanggal :  
Halaman :1  
Kode Lap :LPSGKT

Jakarta,.....2XX1  
Penanggung Jawab UAPB

Nama Penandatanganan  
.....

**10. Laporan Persediaan**

KEMENTERIAN :

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN  
PER SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2XX1

KODE	URAIAN	JUMLAH
	NIHIL	0
	TOTAL	0

Jakarta,.....2XX1

Penanggung Jawab UAPB

Jakarta,.....2XX1

Petugas Pengelola Persediaan

Nama Penandatanganan  
.....

Nama Penandatanganan  
.....

**11. Laporan Neraca**

KEMENTERIAN :

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PERTANGGAL 31 DESEMBER 2XX1  
 TAHUN ANGGARAN 2XX1

Tanggal :  
 Halaman :1  
 Kode Lap :LBAPKT

NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
		0
	JUMLAH	0

Jakarta,.....2XX1

Penanggung Jawab UAPB

Nama Penandatanganan  
 .....





**14. Laporan Kondisi Barang**

LAPORAN KONDISI BARANG PERSEDIAAN  
Per <Hari>, 31 Desember 2xx1

Tanggal :  
Halaman :  
Kode Lap : LKBT-PKPBI

NO	Sub-Sub Kelompok		NUP	Satuan	Harga Perolehan	Kondisi		
	Kode Barang	Nama Barang				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x.xx.xx.xx	.....	0	-	0	0	0	0
		Jumlah			0	0	0	0

Jakarta,.....2xx1

Penanggung Jawab UAPB

Nama Penandatanganan

.....

FORMAT 16

RENCANA TINDAK KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2xx1

KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN		RENCANA TINDAK	JADUAL PENYELESAIAN
		I	II		
1	2	3	4	5	6
					7

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan  
.....

MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT KEMENTERIAN PERTAHANAN  
TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2011

KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	TEMUAN PEMERIKSAAN	KLASIFIKASI TEMUAN		RENCANA TINDAK (SESUAI DENGAN SURAT NOMOR.....2011)	JADUAL PENYELESAIAN	PROGRES PER....2011	UNIT PENANGGUNG JAWAB	KET	
		I	II						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan  
.....

FORMAT 17

DAFTAR REKENING KEMENTERIAN PERTAHANAN  
UNTUK TRIWULAN/SEMESTER YANG BERAKHIR 31 MARET 2xx1/  
30 JUNI 2xx1/30SEPTEMBER 2xx1/31 DESEMBER 2xx1 \*)

KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR	KANTOR SATUAN KERJA	KEMHAN/UNIT ORGANISASI	BA	JENIS REKENING (GIRO/DEPOSIT O)	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	REK ATAS NAMA	BANK/ KANTOR POS	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\*) coret yang tidak perlu

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan  
.....

MONITORING PENUTUPAN REKENING KEMENTERIAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BANK. ....

No	NOMOR REKENING	TANGGAL PENUTUPAN	SALDO YANG DISETOR	TGL DAN SURAT BANK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	Jumlah				

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan  
.....

INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 2xx1

KEMENTERIAN PERTAHANAN  
BAGIAN ANGGARAN .....

NO	PENDAPATAN BELANJA		REALISASI MENURUT BASIS KAS	PENYESUAIAN AKRUAL		REALISASI MENURUT BASIS AKRUAL	DOKUMEN SUMBER
	KODE AKUN	URAIAN		TAMBAH	KURANG		
1	2	3	4	5	6	7	8

<Nama kota, tanggal-bulan-tahun>

Menteri Pertahanan,

Nama Penandatanganan

.....

FORMAT 18

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAPA

<b>KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA SEMESTERAN/TAHUNAN</b>			
Kode dan Nama K/L: ( ..... ) .....			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok ( <i>Hardcopy</i> )	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA face			Ada
2. Neraca			Ada
3. Laporan Operasional			Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas			Ada
5. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja			Ada
6. Neraca Percobaan Akrua			Ada
7. Catatan atas Laporan Keuangan			Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca			Sama
3. Neraca: Aset = Kewajiban + Ekuitas			Sama
4. LPE: Apakah akun "Ekuitas Awal" DITAMBAH akun "Kenaikan/ Penurunan Ekuitas" sama dengan "Ekuitas Akhir"			Sama
<i>Apabila perhitungan no.4 diatas menghasilkan "tidak sama" berarti ada jurnal menggunakan akun 391111</i>			
KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK			
Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LKKL sama dengan Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
2. Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LKKL sama dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama
3. Apakah seluruh akun Neraca pada LKKL sama dengan Neraca dari Aplikasi e-Rekon-LK?			Sama

4.	Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LKKL sama dengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekor-LK?			Sama
<i>Apabila terdapat perbedaan, agar diuraikan apa saja yang berbeda dan apa sebabnya pada Lampiran Telaah.</i>				
<b>NERACA PERCOBAAN AKRUAL</b>				
<b>Pengecekan Saldo Tidak Normal</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
<b>Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)</b>		<b>Ya</b>	<b>tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) ( <i>kec. Penyisihan dan Akumulasi</i> )			Ya
2.	Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3.	Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4.	Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)			Ya
5.	Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) ( <i>kec. Pengembalian Pendapatan</i> )			Ya
6.	Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)			Ya
7.	Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) ( <i>kec. uli Beban Penyisihan Piutang</i> )			Ya
8.	Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>kec. DIRRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
2.	Adakah akun 41xxx (Pendapatan Perpajakan) <i>kec. BA.015</i>			Tidak
3.	Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) <i>Cat: seharusnya 423221</i>			Tidak
4.	Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang TAYL)			Tidak
5.	Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)			Tidak
6.	Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
7.	Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
8.	Adakah akun 43xxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
9.	Adakah akun selain di atas yang seharusnya tidak ada? ( <i>misalnya pendapatan SIM/STNK pada Kementerian Pertanian, dsb.</i> )			Tidak
<b>Jika Tidak Memiliki Satker BLU</b>		<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)			Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
<b>Hibah Langsung</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) <i>cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk barang/jasa</i>			Ya
2.	Nilai 111827 lebih kecil atau maksimal sama dengan nilai 218211?			Ya
3.	Jika pada Saldo Awal ada akun 218211, pada LK Triwulan III juga ada			Ya

<b>Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari perhitungan akun TM dikurangi akun TK			-
2. Apakah nilai TM dan TK wajar?			Ya
3. Apakah nilai TM dan TK ada penjelasannya di CaLK?			Ya
<b>Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>			
1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?			Ya
2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan Lainnya?			Ya
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b>			
<b>Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
<b>Pengecekan saldo Normal</b>			
	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
9. Apakah seluruh akun di LO bernilai positif?			Ya
10. Apakah seluruh akun beban penyisihan piutang bernilai positif?			Ya/Tidak
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
<b>Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) + Penghapusan Piutang (Jk. Pendek dan Jk. Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO			Ya
<b>Pengecekan Antar Laporan</b>			
	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
12. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?			Ya
<i>Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal pembelian Materai), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.</i>			
13. Adakah beban bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?			Ya
<i>Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal menggunakan kode kelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan.</i>			

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
<b>Pengecekan akun tertentu</b>	<b>Ada/Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
2. Bila tidak ada, apakah wajar?			Ya
3. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Ya/Tidak
4. Bila ada, apakah benar?			Ya
<i>Akun ini berasal dari Inventarisasi dan Penilaian dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK</i>			
<b>NERACA</b>			
<b>Pengecekan Persamaan Akuntansi</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran= Uang Muka dari KPPN			Sama
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan Jurnal Akrua</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)			Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada
2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada
3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:			Ada
- Beban Persediaan (di LO)			Ada
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)			Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada
5. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
6. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)			Ada/Tidak
7. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)			Ada

## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB per akun			Tidak
2 Adakah uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
Isi kolom di sebelah kanan selisih Rekon (SiAP- SAI) dari E-Rekon-LK tingkat KL, menu Rekonsiliasi sisi GL atas			
1 BLU (Belanja Bruto)			
2 DIPA (DIPA Sisi Belanja)			
3 EST (DIPA Sisi Pendapatan)			
4 KASBLK (Kas dan Bank BLU Koreksi)			
5 KASBLM (Kas dan Bank BLU Mutasi)			
6 KASBLS (Saldo Kas dan Bank BLU)			
7 KASBPK (Kas di Bendahara Pengeluaran Koreksi)			
8 KASBPM (Kas di Bendahara Pengeluaran Mutasi)			
9 KASBPS (Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran)			
10 KASHBK (Kas Lainnya di KL dari Hibah Langsung Koreksi)			
11 KASHBM (Kas Lainnya di KL dari Hibah Langsung Mutasi)			
12 KASHBS (Saldo Kas Lainnya di KL dari Hibah Langsung)			
13 PBLU (Pengembalian Belanja)			
14 PND (Pendapatan Bruto)			
15 PPND (Pengembalian Pendapatan)			
16 LAIN-LAIN (selain yang di atas)			

### LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

*\*Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon-LK\**

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL,

.....  
Penelaah,

( )  
NIP

( )  
NIP

**BERITA ACARA REKONSILIASI  
UANG DAN BARANG PADA PROGRAM  
FOREIGN MILITARY SALES (FMS)  
ANTARA  
SATKER PENGADAAN UO ..... (.....)  
DENGAN  
PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT  
PERIODE SEMESTER/TAHUNAN TA 2020**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan Juli tahun 2020 telah diselenggarakan rekonsiliasi khusus pembiayaan Program *Foreign Military Sales (FMS)* antara Satker Pengadaan UO ..... (.....) dengan Perwira FMS di Amerika Serikat melalui Kabag Malur Ses Baranahan Kementerian Pertahanan.

Rekonsiliasi ini dilaksanakan secara bersama-sama berdasarkan dokumen-dokumen pada masing-masing pihak dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Satker UO ..... (.....) Semester I TA. 2020.

Hasil Rekonsiliasi ini dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

**1. Jumlah LOA Semester I TA.2020.**

Terdapat perbedaan jumlah LOA : sebesar USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total LOA : .....sebesar USD.....

**2. Saldo per 31 Desember 2019 (saldo awal TA.2020).**

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

**3. Jumlah Dana yang diterima s.d 30 Juni 2020.**

Terdapat perbedaan jumlah USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah Total USD.....

**4. Jumlah Pembayaran s.d 30 Juni TA. 2020.**

Terdapat perbedaan jumlah USD:...../Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah Total USD.....

**5. Jumlah Saldo per 30 Juni 2020 (Semester I TA 2020).**

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

**6. Jumlah Penyajian (uang muka belanja) per 30 Juni 2020 (Semester I Tahun 2020)**

Terdapat perbedaan jumlah USD.....atau Rp.....,-/Nihil antara Laporan Perwira FMS di Amerika Serikat dan Satker Pengadaan UO TNI AL dengan jumlah total USD.....sebesar Rp.....,-

Yang secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi. Laporan Hasil Rekonsiliasi dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Jakarta, 2020  
a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat  
Kabag Malur Ses Baranahan  
Selaku Pejabat Penanggung jawab  
Rekonsiliasi Perwira FMS

Nama  
.....NRP.....

Mengetahui:  
a.n. Pejabat UAPA  
Kabag/Kabid.....

Nama  
.....NRP.....

Jakarta, 2020  
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
.....  
Selaku Pejabat Penanggung jawab  
Rekonsiliasi UAKPA

Nama  
.....NRP.....

Mengetahui:  
a.n. Pejabat UPPA Es. 1 UO  
Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Nama  
.....NRP.....

LAMPIRAN BAR PROGRAM FMS 1

REKONSILIASI UANG, BARANG DAN JASA DARI PROGRAM FOREIGN MILITARY SALES (FMS)  
 ANTARA SATKER PENGADAAN : SATKER UO ..... (....) DENGAN PERWIRA FMS DI AMERIKA SERIKAT  
 PERIODE SEMESTER/TAHUNAN TA 2020

Kementerian Negara/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan  
 Eselon-1 : 01 Kementerian Pertahanan  
 Wilayah/Provinsi : .....  
 Kode Satker : ..... Satker .....  
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	LOA		SALDO AWAL DESEMBER 2019		PEMBAYARAN (COLLECTED) s.d 30 JUNI 2020		BARANG & JASA DITERIMA (DELIVERED)		SALDO AKHIR 390 JUNI 2020 / 31 DESEMBER 2020		KET	
		JUMLAH	NILAI	USD	RP	USD	RP	USD	RP	USD	RP		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PERWIRA FMS												
2	UO .....												
3	JUMLAH SELISIH												

Keterangan:

- 1 LOA .....
- 2 LOA .....
- 3 LOA .....
- 4 LOA .....

Jakarta, 2020  
 a.n. Pejabat UAPA  
 Kabag/Kabid .....

Jakarta, 2020  
 a.n. Pejabat UAPA Es.1 UO  
 Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Jakarta, 2020  
 a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat  
 Kabag Malur Ses Baranahan  
 Selaku Pejabat Penanggung jawab Rekonsiliasi  
 Perwira FMS

Jakarta, 2020  
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
 Selaku Pejabat Penanggung jawab  
 Rekonsiliasi UAKPA

Nama .....  
 NRP .....

Nama .....  
 NRP .....

Nama .....  
 NRP .....

Nama .....  
 NRP .....

LAMPIRAN BAR PROGRAM FMS 2

REKONSILIASI DANA YANG DITERIMA PERWIRA FMS DENGAN PEMBAYARAN (COLLECTED)

Kementerian Negara/Lembaga : 012 Kementerian Pertahanan  
 Eselon-1 : 01 Kementerian Pertahanan  
 Wilayah/Provinsi : .....  
 Kode Satker : ..... Satker .....  
 Jenis Satuan Kerja : KP

NO	URAIAN	LOA		DANA YANG DITERIMA		PEMBAYARAN (COLLECTED)		KET
		NO...	USD	USD	RP	USD	RP	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	PERWIRA FMS							
2	UO .....							
3	<b>JUMLAH SELISIH</b>							

Keterangan:

- 1 LOA .....
- 2 LOA .....
- 3 LOA .....
- 4 LOA .....

Jakarta, 2020  
 a.n. Pejabat UAPA  
 Kabag/Kabid .....

Jakarta, 2020  
 a.n. Pejabat UAPA Es.1 UO  
 Kabag/Kabid/Kasubdit/Kasubdis

Jakarta, 2020  
 a.n. Perwira FMS di Amerika Serikat Kabag  
 Malur Ses Baranahan Selaku Pejabat  
 Penanggung jawab Rekonsiliasi Perwira FMS

Jakarta, 2020  
 a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
 .....  
 Selaku Pejabat Penanggung jawab  
 Rekonsiliasi UAKPA

Nama  
 .....NRP.....

Nama  
 .....NRP.....

Nama  
 .....NRP.....

Nama  
 .....NRP.....

Realisasi Pembayaran Dana Cadangan Alutsista Kemhan dan TNI UAPA

No	Nomor/Suplier/Deskripsi Kontrak	Tanggal Pekerjaan		Mata Uang	Nilai Kontrak	Pembayaran Melalui Dana Cadangan	Nomor SKP	Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Sisa
		Mulai	Selesai							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (7-10)

Jakarta, ..... 2xx1  
 Penanggung Jawab UAPA

Nama Penandatanganan  
 .....

Kepala  
 Pusat-Pelaporan dan Pembinaan  
 Kementerian Pertahanan,  
  
 Agus Supriadi, S.Sos  
 Laksamana Pertama TNI